

# Marves

Kemaritiman dan Investasi

## Kaleidoskop 2020

Refleksi Akhir Tahun Kinerja Sektor Kemaritiman dan Investasi



# Daftar Isi



## Salam Marves

- 04** | Refleksi Akhir Tahun Kinerja Sektor Kemaritiman dan Investasi

## Liputan Utama

- 07** | Serius Jalin Kerja Sama dengan Investor untuk Indonesia Pemerintah Keluarkan Kebijakan *Indonesian Sovereign Wealth Fund*

## Kilas Balik

- 08** | Kompilasi Foto Giat Kemenko Marves Periode Bulan Oktober - Desember Tahun 2020

## Liputan

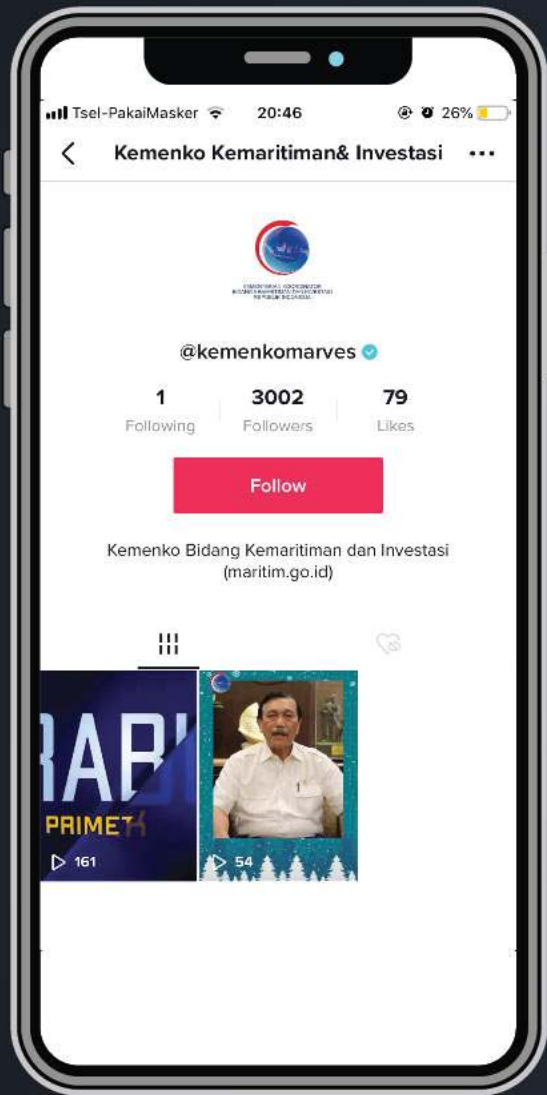
- 10** | Junjung Tinggi Inovasi di Tengah Pandemi, Negara Pulau dan Kepulauan Terus Berkomitmen untuk Maju dan Menjaga Lautan Melalui Rangkaian Kegiatan Forum AIS
- 14** | PEN-ICRG Bantu Perekonomian Bali Akibat Pandemi
- 16** | Akselerasi Program Tol Laut Di Tengah Pandemi
- 20** | Pemerintah Dorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Kehutanan
- 24** | Menangkap Momentum bagi Pariwisata Nasional di Masa Pandemi
- 26** | Pemerintah Upayakan Terjadinya Peningkatan Nilai Investasi di Indonesia

## Kolom

- 28** | Indonesia Menjadi Kunci di *UN World Ocean Assessment* Putaran Ketiga

## Feature

- 32** | Resensi Film: *The Call* "Masa Lalu untuk Masa Depan"
- 34** | Cerita Pendek "Elegi Stasiun Tua" Karya Joko Rehutomo



FOLLOW US ON



TikTok

[tiktok.com/kemenkomarves](https://www.tiktok.com/@kemenkomarves)

# Refleksi Akhir Tahun Kinerja Sektor Kemaritiman dan Investasi

Hai Tim Marves!

Selama hampir setahun kita semua menghadapi Pandemi Covid 19 yang telah mengubah banyak hal. Namun demikian, pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi tetap berupaya keras untuk menjalankan pembangunan di tengah kondisi yang terbatas.

Berbagai jenis pembangunan baik infrastruktur, sumberdaya manusia, konservasi lingkungan dan kebijakan stimulan investasi terus dilakukan. Di penghujung tahun 2020 ini, kami sajikan perkembangan beragam program pemerintah di sektor kemaritiman dan investasi. Kemudian, pada kolom *highlight*, kami juga menyampaikan kilas balik program Kemaritiman dan Investasi selama kurun waktu satu tahun lengkap dengan visualisasinya.

Informasi-informasi yang kami sajikan antara lain mengenai hasil pertemuan tingkat tinggi negara-negara anggota Forum *Archipelagic and Island States* (AIS), program padat karya penanaman mangrove untuk perbaikan

perekonomian masyarakat di sektor pariwisata, perkembangan tol laut, perkembangan pengembangan *food estate* di Humbanghas, forum investasi dunia serta upaya peningkatan iklim investasi melalui UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, di dalam terbitan kali ini, kami juga akan menyampaikan informasi tentang kiprah Indonesia di dalam UN *world ocean assesment*.

Pandemi Covid memang telah mengubah banyak hal di dalam hidup kita tetapi hal ini tidak boleh menghalangi kita untuk meningkatkan imunitas dengan bersantai. Oleh karena itu, selain menyajikan berita sarat informasi, tidak ketinggalan kami juga menyajikan resensi film serta cerita pendek yang dapat menemani waktu liburan Tim Marves. Selamat menikmati.

Salam Marves!

**Agung Kuswando**  
Sekretaris Kemenko Marves



Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi  
@kemenkomarves



**Tim Marves, yuk main tebak-tebakan.**  
**Apa sebutan untuk rumah adat Batak ya?**

- A. Rumah Demogorgon
- B. Rumah Gorga atau Rumah Bolon



**@ridho\_rahman**  
Di laut ada lumba-lumba  
Di hutan ada bunglon  
Sebutan untuk rumah  
adat Batak Toba  
Adalah B. Rumah Gorga atau  
Rumah Bolon



**@dorahomer2002**  
Aku karena bukan  
orang batak  
jadi aku aminkan saja  
yang jawab B



**@muhammad\_naufal\_f10**  
jawabannya yaitu B. Rumah Gorga  
atau Rumah Bolon.  
Rumah adat suku Batak di daerah  
Sumatera Utara namanya Rumah  
Bolon atau sering disebut dengan  
Rumah Gorga. Rumah ini menjadi  
simbol keberadaan masyarakat  
Batak yang hidup di daerah tersebut.



**@odielz\_12**  
Pastinya B donk...  
Rumah Gorga/Rumah Bolon





Indonesian SWF akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk **menanamkan investasi dalam bentuk ekuitas atau aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional**

**Luhut B. Pandjaitan**  
Menko Marves

# SERIOUS JALIN KERJA SAMA

## dengan Investor untuk Indonesia, Pemerintah Keluarkan Kebijakan *Indonesian Sovereign Wealth Fund*

**Majalah Marves** - Pemerintah saat ini tengah menjalin kerja sama dengan para investor dalam program *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia, yang juga dikenal sebagai *Indonesia Investment Authority* (INA). Pemerintah pun telah merancang berbagai strategi agar program dapat berjalan secara optimal.

Pada 23 Oktober 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko) Luhut Binsar Pandjaitan menerima *Chief Executive Officer* (CEO) *United States International Development Finance Corporation* (US IDFC) Adam S. Boehler didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim di Jakarta yang dilanjutkan dengan pertemuan di Amerika Serikat pada 19 November 2020. Dalam pertemuan tersebut, CEO US IDFC Adam Boehler menandatangani *Letter of Interest* (LOI) untuk menginvestasikan sebesar USD 2 miliar ke SWF Indonesia.

Dalam rangka menggalang dukungan atas pembentukan SWF Indonesia, Menko Maritim dan Investasi bersama Menteri BUMN melakukan kunjungan ke Jepang pada awal Desember 2020. "Tujuan saya dan Menteri Erick ke Tokyo adalah untuk mengundang Jepang tingkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanat UU Omnibus. *Nusantara Investment Authority* (saat ini *Indonesia Investment Authority*) akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk ekuitas atau aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional," tegas Menko Luhut.

"SWF ini kami harapkan dapat menjadi partner bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor yang atraktif dan prioritas di Indonesia, antara lain jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Kita ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalisasikan nilainya," ditambahkan Menteri Erick.

Dalam kunjungan tersebut, dilaksanakan pertemuan dengan Penasehat Perdana Menteri Jepang Izumi Hiroto dan Gubernur *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) MAEDA Tadashi untuk membahas partisipasi JBIC ke SWF Indonesia.

"JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar 4 miliar USD (Rp57 triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan *the US International Development Finance Corporation* (DFC) Lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat," ujar Menko Luhut pada pertemuan di Tokyo, Jumat (4-12-2020).

"JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia. Dukungan dari JBIC dan Pemerintah Jepang tentunya akan memperkuat ikatan kerja sama strategis Indonesia-Jepang, dan semakin menarik sektor swasta Jepang lainnya berinvestasi di Indonesia," ungkap Duta Besar Heri Akhmadi.

SWF Indonesia atau INA yang akan mulai beroperasi awal tahun 2021 ditargetkan menjadi salah satu kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, dimana komponen pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari permintaan domestik, melainkan juga dengan mendorong masuknya investasi. Pemerintah Indonesia telah siap menyuntikkan modal awal sebesar Rp75 triliun untuk pembentukan INA ini.

SWF Indonesia akan menjadi instrumen penting bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia. Kehadiran SWF akan semakin memperkuat transparansi pengelolaan aset infrastruktur di Indonesia secara profesional dan sesuai dengan *good international practice*.

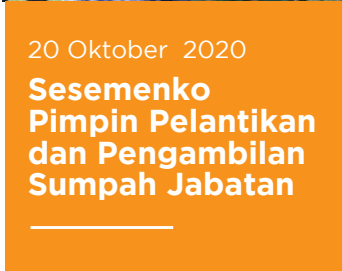
# Kilas Balik



13 Oktober 2020  
**Deputi Nani  
Kunjungan Ke  
Pontianak**



10 Oktober 2020  
**Interview dengan  
Pak Karni (Tv One)**



20 Oktober 2020  
**Sesemenko  
Pimpin Pelantikan  
dan Pengambilan  
Sumpah Jabatan**



25 Oktober 2020  
**Menko Luhut  
Dialog Indonesia  
Bicara di TVRI**



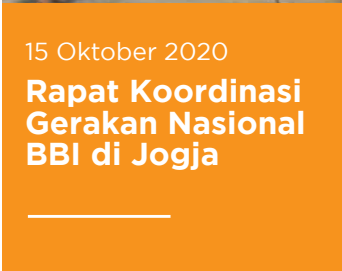
05 Oktober 2020  
**Deputi Seto  
Tandatangan  
Perjanjian Kinerja**



22 Oktober 2020  
**Kunjungan Kerja  
Menko Marves  
ke PEN Mangrove  
di Brebes**



11 November 2020  
**Clean Up Pantai  
Sampangan  
di Banyuwangi**



15 Oktober 2020  
**Rapat Koordinasi  
Gerakan Nasional  
BBI di Jogja**



11 November 2020  
**Menko Luhut  
Pimpin Upacara  
Hari Pahlawan  
di Kantor Marves**



19 November 2020  
**Temu Netizen  
Lebih Dekat  
dengan  
Kemenko Marves**



10 November 2020  
**Menko Luhut  
Simulasi Protokol  
Kesehatan  
Pariwisata**



25 November 2020  
**Rapat Koordinasi  
Perhutanan  
Sosial**



06 November 2020  
**Menko Luhut  
Kunjungan  
Ke Hyundai**



26 November 2020  
**Menko Luhut  
Pimpin Rapat  
Pimpinan di  
Kantor Marves**



29 Desember 2020  
**Deputy Ayodhia  
dalam Acara FMB9  
dengan Tema  
Komitmen Negara  
Membangun  
Infrastruktur**



01 Desember 2020  
**Deputy Bidang  
Koordinasi Kedaulatan  
Maritim dan Energi  
Evaluasi  
Capaian Kinerja**



18 Desember 2020  
**Menko Luhut  
Kunjungan ke  
Food Estate  
Humbanghas**



28 September 2020  
**Millennials  
Talks! The Rise  
of Indonesia's  
Maritime and  
Investment**



10 Desember 2020  
**Webinar  
Pilah Sampah**



15 Desember 2020  
**Menko Luhut  
Upacara Peresmian  
Tunnel 1  
Breakthrough**





Junjung Tinggi Inovasi di Tengah Pandemi,  
**Negara Pulau dan Kepulauan Terus  
Berkomitmen untuk Maju dan Menjaga Lautan  
Melalui Rangkaian Kegiatan Forum AIS**



Tema yang diusung dalam pertemuan ke-3 tingkat Menteri ini mencanangkan pentingnya solidaritas antar negara pulau dan kepulauan demi masa depan laut dunia, khususnya di tengah berbagai kesulitan yang dirasakan bersama.

**Majalah Marves** - Kembali melaksanakan pertemuan ke-3 Tingkat Menteri (*The 3rd Ministerial Meeting*) untuk menyukseskan komitmen negara pulau dan kepulauan dunia yang tergabung dalam Forum AIS, Kemenko Marves bersama United Nations Development Program (UNDP) kembali berkolaborasi Julam menggagas pertemuan ini. Dengan mengusung tema "*Fostering Solidarity Between Archipelagic and Island States: Towards a Sustainable Ocean Future*", pertemuan ini diselenggarakan pada Rabu, (25-11-2020) di Jakarta. Karena Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, pertemuan ini diselenggarakan secara virtual dengan zona waktu yang menyesuaikan negara masing-masing. Sebelumnya, telah pula diselenggarakan pertemuan persiapan yang bertajuk pertemuan ke-5 Tingkat Pejabat Tinggi (*The 5th Senior Official Meeting*) yang juga diselenggarakan dengan format yang sama.

Tema yang diusung dalam pertemuan ke-3 tingkat Menteri ini mencanangkan pentingnya solidaritas antar negara pulau dan kepulauan demi masa depan laut dunia, khususnya di tengah berbagai kesulitan yang dirasakan bersama, "Pandemi Covid 19 yang dirasakan oleh seluruh dunia ini telah mengubah berbagai tatanan masyarakat, seluruh negara pulau dan kepulauan harus menjunjung tinggi solidaritas untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan selaku pimpinan pertemuan. pertemuan ini dihadiri oleh 5 Menteri dari negara partisipan, 24 perwakilan negara partisipan dan 6 organisasi internasional. Selain menjaga momentum kolaborasi bersama antar negara, penyelenggaraan pertemuan ini memiliki tujuan utama untuk mempersiapkan Konferensi Pertama Tingkat Kepala Negara.

Berfokus pada sisi positif dari krisis yang melanda, pertemuan para menteri kali ini berusaha menggali berbagai potensi dari sektor kemaritiman. Diharapkan berbagai inovasi akan lahir dan dapat dikembangkan untuk memaksimalkan strategi ekonomi biru demi pulihnya ekonomi masyarakat dunia. "Pandemi tidak dapat mematahkan semangat kita untuk terus berkolaborasi dan memecahkan berbagai tantangan yang ada, para masyarakat negara pulau dan kepulauan merupakan rakyat yang tangguh. Mengalir di darah kita semangat inovasi, adaptasi, daya guna, dan berorientasi kepada hasil," tambah Menko Luhut.

"Sekretariat Forum AIS telah menciptakan kerangka kunci yang berfokus kepada hasil. Pengembangan mekanisme finansial, kebijakan operasional ekonomi biru, dan menciptakan hub-inovatif untuk mengakomodasi pengusaha muda menjadi serangkaian usaha bersama negara pulau dan kepulauan," tegas Menko Luhut. Sekretariat Forum AIS juga telah menyokong kapasitas dan kemampuan pemuda masyarakat pulau dan kepulauan melalui riset bersama dan program beasiswa, demi menciptakan perubahan nyata. Melalui sambutannya pula, Menko Luhut menekankan bahwa



Archipelagic  
& Island States  
Forum

## The 3<sup>rd</sup> Ministerial Meeting

*Fostering Solidarity Between Archipelagic and Island States:  
Towards a Sustainable Ocean Future*

25 November 2020 | 01:00 EDT, 06:00 BST, 15:00 JST



# Sekilas Tentang Forum Archipelagic & Island States

47

## Negara Pulau dan Kepulauan

Negara-negara dengan level pertumbuhan ekonomi, kedewasaan institusi pemerintahan, maupun luas teritorial yang sangat unik dan beragam, program dan kolaborasi yang dilaksanakan dalam Forum AIS tidak hanya harus menjawab tantangan pembangunan dan persoalan bersama (*common challenges*) negara Forum AIS namun juga harus memastikan seluruh negara AIS dapat terlibat,



tahun 2021 akan menjadi tahun krusial bagi seluruh negara partisipan untuk menguatkan kolaborasi dan menyambut Konferensi Tingkat Kepala Negara yang pertama. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku kepala sidang, serta Norimasa Shimomura, perwakilan UNDP tetap di Indonesia sebagai wakil ketua sidang. Melihat telah rampungnya dokumen luaran Pertemuan ketiga Tingkat Menteri Forum AIS, dasar dari keberlangsungan pertemuan ini sendiri semakin menjadi kokoh untuk dijalankan.

#### **Sekilas Tentang Forum AIS**

Penerapan prinsip kolaborasi, solidaritas, dan inklusivitas sangat penting dalam konteks Forum AIS. Sebagai forum yang terdiri dari 47 negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia, dan sebagai forum yang terdiri dari negara-negara dengan level pertumbuhan ekonomi, kedewasaan institusi pemerintahan, maupun luas teritorial yang sangat unik dan beragam, program dan kolaborasi yang dilaksanakan dalam Forum AIS tidak hanya harus menjawab tantangan pembangunan dan persoalan bersama (*common challenges*) negara Forum AIS namun juga harus memastikan seluruh negara AIS dapat terlibat, berkontribusi dan menerima manfaat dari kolaborasi yang dilaksanakan. Lebih dari itu, mempertimbangkan kondisi pasca pandemi Covid 19 yang dihadapi berbagai negara Forum AIS, rencana kolaborasi yang akan dilaksanakan juga harus responsif terhadap *post-pandemic economic recovery measures* yang akan dilaksanakan oleh berbagai negara Forum AIS.

#### **Kunci Utama Dalam Menyolidkan Negara Pulau dan Kepulauan dalam Menghadapi Masa Pandemi**

Ada empat kunci utama yang dibahas lebih jauh dalam pertemuan ini, pertama mengenai korelasi antara perkembangan ekonomi dengan perlindungan lingkungan global, demi menjaga dunia kemaritiman dan ekosistem kelautan. Kedua, mengenai strategi kerja sama ekonomi biru

yang mampu mengidentifikasi, membuka, dan mengembangkan berbagai potensi kemaritiman. Ketiga, konektivitas digital ekonomi biru, dimana kapasitas digital harus dibangun, meningkatkan akses, dan pengembangan infrastruktur bersama-sama. Serta yang keempat mengenai investasi laut yang berkelanjutan untuk mengembangkan mekanisme dan berbagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dunia.

“Keempat tema kunci ini saling berkorelasi satu dengan yang lainnya, demi menjaga dan meraih keberlanjutan sektor kemaritiman dunia dan bersama-sama kita menghadapi krisis pandemi yang melanda,” imbuh Kemenparekraf Wishnutama Kusubandio.

Menambahkan, Norimasa Shimomura menegaskan bagaimana potensi kemaritiman pula menjadi salah satu kunci bagi dunia untuk terus berinovasi dan keluar dari kejenuhan yang ada sekarang ini. “Laut memiliki berbagai potensi yang menunjang kehidupan manusia, potensi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi dunia untuk segera pulih dari pandemi, dengan mengintegrasikan praktek perkembangan prinsip kehidupan berkelanjutan, demi menyeimbangkan kehidupan manusia secara utuh,” ungkapnya.

Dengan format pertemuan virtual, seluruh perwakilan negara partisipan mendapatkan waktu untuk memberikan masukan-masukan terkait empat tantangan utama dan juga laporan persiapan kelanjutan hingga konferensi pertama tingkat kepala negara yang akan datang. Secara keseluruhan, pertemuan ini tidak mengalami kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan secara maksimal terlepas dari keterbatasan fisik yang menghadang.

Pertemuan ini memiliki harapan agar seluruh inovasi, kolaborasi, serta semangat yang tinggi dari seluruh negara pulau dan kepulauan dapat terus terjaga dengan maksimal. Diharapkan, berbagai rintangan yang tengah melanda dunia kini dapat dilihat dari sisi yang memberikan harapan.

Program ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya pada sektor informal atau UMKM.

# PEN-ICRG Bantu Perekonomian Bali Akibat Pandemi

**Majalah Marves** – Pandemi Covid-19 (Corona) nyatanya bukan hanya mengakibatkan ‘krisis kesehatan’ saja, melainkan juga ‘krisis pendapatan’ atau masalah perekonomian. Untuk di Indonesia sendiri, beberapa daerah mengalami dampak perekonomian yang sangat drastis penurunannya, salah satunya di Bali. Untuk membantu perekonomian tersebut, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Restorasi Terumbu karang (ICRG)/ PEN-ICRG (*Indonesia Coral Reef Garden*) Bali. Peluncuran dilaksanakan pada hari Rabu (07-10-2020) silam.

Menko Luhut menjelaskan, program ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya pada sektor informal atau UMKM. Bali, dipilih sebagai salah satu target pemerintah dalam program PEN-ICRG, sebab provinsi ini sangat bergantung dari sektor Pariwisata di mana kunjungan wisata mancanegara (wisman) saat ini berkurang signifikan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan restorasi Terumbu Karang yang terluas/ terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia (dan di dunia). Terlepas dari itu, yang terpenting bagaimana kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pesisir di Bali untuk mengatasi/mengurangi dampak pandemi Covid-19, khususnya di sektor kelautan dan wisata bahari. Mari kita bekerja sama untuk membuat ini menjadi bagus,” jelas Menko Luhut.

Menko Luhut mengatakan program PEN-ICRG yang akan dipusatkan pada perairan Nusa Dua di samping daerah lainnya seperti Sanur, Serangan, Pantai Pandawa hingga perairan

Buleleng dengan luas 50 Hektar merupakan program terbesar yang pernah dilakukan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengungkapkan diketahui sebanyak 11.327 *stakeholder/pekerja* yang terlibat dalam program PEN-ICRG ini, yang terdiri antara lain dari penyelam, seniman patung, *catering/* penjual makanan, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan PEN-ICRG yang merupakan ikon restorasi terbesar di Indonesia ini, Deputi Safri juga sempat mengungkapkan bahwa semua program harus selesai tepat waktu, dengan target di bulan Desember. “Untuk itu, pertama-tama harus dipastikan SOP yang jelas, mulai dari pembuatan hingga selesai harus dipastikan metodologinya,” ungkap Deputi Safri, Jumat (30-10-2020) silam.

## Dana PEN-ICRG Bali

Sebelum peresmiannya ini, Bali diketahui merupakan satu-satunya daerah yang diajukan mendapatkan dana PEN untuk restorasi terumbu karang, dengan total pengajuan dana PEN itu sendiri sebesar Rp. 115 Miliar (dana masih dalam penggodokan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)). Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengelola Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Andreas A Hutahaean.

“Dipilihnya Bali karena merupakan tujuan wisata bahari dengan keindahan bawah lautnya yang banyak diburu wisatawan. Bali juga merupakan tumpuan ekonomi

masyarakat dan pemerintah daerahnya. Sehingga di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi di Bali, pemerintah pusat hadir dengan memberikan trigger untuk memutar ekonomi dari bawah,” jelasnya Kabid Andreas, Rabu (16-09-2020) silam.

### Dukung PEN-ICRG Bali, Kemenko Marves Kerja Sama dengan Lembaga Riset MTCRC Korea-Indonesia

Tak hanya melalui pemerintah, Program PEN-ICRG ini pun mendapat dukungan dari Lembaga Riset Internasional *Marine Technology Cooperation Research Center* (MTCRC) Korea-Indonesia. Pada Senin (30-11-2020) silam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin melakukan kerja sama dengan Lembaga Riset Internasional MTCRC Korea-Indonesia dalam mendukung restorasi terumbu karang atau ICRG (*Indonesia Coral Reef Garden*) di Bali.

“Kolaborasi/ kerja sama ini bermakna dan simbolis. Program ini diharapkan menjadi ambisi Indonesia untuk menjadikan Bali sebagai objek wisata terbaik dan upaya untuk memulihkan lingkungan alam. Selain itu, program tersebut juga telah menarik perhatian pada kemajuan yang telah dicapai pemerintah untuk memperoleh kerjasama internasional dengan Korea untuk menciptakan lebih banyak peluang dan ruang untuk pemulihan dan pembangunan ekonomi,” ungkap Deputi Safri.

Sementara itu, sebagai pelaksana kegiatan penelitian dan survei, Korea-Indonesia MTCRC sendiri merupakan lembaga penelitian internasional di bidang ilmu dan teknologi kelautan antara pemerintah Korea dan Indonesia untuk memperkuat dan mempromosikan kerjasama praktis di bidang ini.

“Sains dan teknologi adalah elemen kunci pembangunan nasional. Kami sangat senang dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia melalui kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi maritim Korea, kami menantikan kerjasama yang lebih banyak lagi kedepannya,” kata *Co-Director* MTCRC Korea Dr. Hansan Park.

Dalam kerjasama ini, MTCRC telah melakukan survei kelautan yang terdiri dari survei batimetri, data fisik oseanografi, studi dasar laut, dan data kualitas air. Survei batimetri dilakukan untuk mengukur kedalaman perairan yang akan dijadikan lokasi restorasi terumbu karang dan lokasi penenggelaman kapal perang. Survei dasar laut dilakukan untuk mengetahui topografi dan profil dasar laut. Hal ini penting dilakukan mengingat dalam menentukan lokasi penenggelaman kapal perang diperlukan informasi mengenai profil dasar laut. Sedangkan data fisik oseanografi dan data kualitas air digunakan sebagai data pendukung. Hasil survei ini berupa peta rekomendasi yang berisi informasi tentang kedalaman dan profil dasar laut.

Survei akan dilengkapi dengan berbagai alat dan perlengkapan MTCRC yaitu *Multibeam Echosounder*, *Single Beam Echosounder*, CTD, *Grab Sampler*, *Tide Gauge*, *Drone*, dan Kapal ARA. Kapal ARA sendiri merupakan kapal yang dioperasikan oleh MTCRC yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan eksplorasi kelautan. Kapal ini memiliki panjang 12 meter dengan kapasitas 12 orang termasuk awak kapal dan nahkoda.

Diketahui ada lebih dari 569 jenis terumbu karang yang ada di laut Indonesia, dan ini merupakan aset negara yang sangat berharga. Banyak manfaat yang diperoleh dari keberadaan ekosistem terumbu karang, di samping untuk atraksi wisata bahari, Farmakologi, pelindung pantai dari ombak juga sebagai *nursery* dari ikan yang sering kita konsumsi sehari-hari.

## Program PEN-ICRG

11.327 Stakeholder

Akan dipusatkan pada perairan

Nusa Dua

Sanur

Serangan

Pantai Pandawa

Buleleng

50 ha



# Akselerasi Program Tol Laut Di Tengah Pandemi



Komitmen pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang terus menyinergikan berbagai Kementerian/Lembaga terkait guna menyukseskan program untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tidak main-main.

**Majalah Marves** - Program Tol Laut, semenjak pertama kali diresmikan sampai dengan sekarang terus mengalami perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas angkutnya.

Kc dengan berbagai Rakor yang membahas dari mulai kendala, lalu dicarikan solusinya, berbagai peninjauan langsung, hingga berbagai upaya lainnya terus dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di bawah koordinasi dan sinkronisasi Kemenko Marves.

Dalam salah satu Rapat Koordinasi mengenai Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas (Sistem Logistik Nasional) pada 30 September 2020, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menyatakan, menyukseskan program Tol Laut yang telah dicetuskan melalui PerPres 70/2017, memang diperlukan adanya koordinasi antar *stakeholder* baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati rute Tol Laut. "Saya akan memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia GL Kalake, agar terus mengawal program ini dan juga diupayakan untuk dimasukkan ke dalam *National Logistic Ecosystem* (NLE)," ujarnya.



Arahan Menko Luhut tersebut lantas diimplementasikan oleh Plt Deputy Ayodhia dengan kembali menginisiasi sekaligus memimpin rakor virtual “Sinergi – Kolaborasi Program Tol Laut dan Integrasinya dengan Ekosistem Logistik Nasional”, dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan eselon II k/l terkait. “Ada hal yang memang wajib mendapatkan perhatian lebih, antara lain, masalah jadwal, muatan balik kapal yang timpang antara muatan berangkat dan muatan balik, serta masalah subsidi bagi moda transportasi darat,” ujarnya saat membuka Rakor.

Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo lalu memaparkan, bahwa pihaknya sudah melaksanakan pengembangan program Tol laut secara terus menerus. “Jadwal kapal sudah kami terapkan secara online. Secara esensi kami sudah siapkan angkutannya. kami menyiapkan sarana angkutannya, jadi yang isi ini diharap dari kementerian/lembaga lain. karena ada subsidi, dipastikan angkutan kami lebih murah. intinya kami siap sediakan sarana dan sistem, monggo nanti dari institusi lain yang bertugas mengisinya,” ujarnya.

Sementara, dukungan Maksimalisasi Muatan Balik, K/L yang ditugaskan ; Kemendag berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bertugas mengkonsolidasi perdagangan produk unggulan daerah 3TP ke daerah lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan ; konsolidasi dan peningkatan muatan hasil perikanan dan kelautan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ; peningkatan hasil produksi UMKM untuk muatan balik. Kementerian Pertanian ; Konsolidasi dan peningkatan muatan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Kementerian Perindustrian ; Konsolidasi dan peningkatan muatan hasil industri. Kementerian BUMN ; Mendorong BUMN melakukan perdagangan untuk muatan balik. Kementerian Dalam Negeri ; meningkatkan peran serta pemda untuk memaksimalkan muatan balik. Pemerintah Daerah ; mendorong pengusaha daerah untuk meningkatkan perdagangan daerah melalui muatan balik.

Berbagai langkah yang telah dilakukan antara lain ; Kolaborasi *platform* digital antar K/L, sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya Kemenhub didukung PT Telkom Tbk, telah merilis *platform* digital LCS yang kemudian dikembangkan menjadi ver. 2 dan berganti nama menjadi SITOLAUT. Lalu perkembangan selanjutnya, beberapa K/L

terkait program ini juga telah merilis *platform* digital seperti Kemendag dengan sistem informasi Gerai Maritim, dan kemungkinan akan diikuti oleh K/L yang lain.

Kemudian, ada pula *platform* yang mendahului yang bertujuan untuk mendukung penataan *National Logistic Ecosystem* yaitu NLE yang dicoba untuk diintegrasikan sejak awal. “Untuk kolaborasi ini juga sangat penting, tentang tersedianya fasilitas komunikasi yaitu internet di pelabuhan singgah dan Dinas Perdagangan setempat. Kemenkominfo pada pertemuan terdahulu pun menyatakan kesiapan untuk mendukung fasilitas ini, mereka memerlukan informasi titik koordinat Pelabuhan singgah dari Kemenhub dan titik koordinat kantor Disperindag daerah yang dimaksud,” kata Plt Deputy Bidang Koordinasi dan Transportasi Kemenko Marves, Ayodhia GL Kalake dalam Rakor pada tanggal 3 November 2020 tersebut.

Sebelumnya di tanggal yang sama, juga telah dilaksanakan *Pra-Tactical Floor Game*, guna mengembangkan simulasi pelaksanaan program tol laut beserta dengan seluruh kolaborasi-sinergi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik tol laut yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, dalam rangka penyiapan *Hub Spoke* Tol Laut dan muatan balik termasuk daging sapi beku di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputy Bidang Infrastruktur dan Transportasi, gencar melaksanakan koordinasi dan peninjauan lapangan ke fasilitas terkait, khususnya ke Kota dan Kabupaten Kupang pada tanggal 24 November 2020. Koordinasi dilakukan antar Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik tol laut, di antaranya ; Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Pelindo III, dan PT Pelni. Penetapan *Hub-Spoke* untuk penyelenggaraan tol laut sendiri akan dimulai pada tahun 2021.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, Asisten Deputy Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menjelaskan, kesuksesan

## Indonesia Telah Membangun 50 Pelabuhan



## 293 unit kapal

116 unit kapal perintis  
14 unit kapal kontainer  
6 unit kapal ternak  
18 unit kapal rede  
2 unit kapal rumah sakit  
138 kapal pelayaran rakyat

penyelenggaraan pelayanan publik tol laut terutama untuk peningkatan volume muatan balik yang satu sisi diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan ruang kapal, sisi lain dapat meningkatkan perdagangan di daerah yang disinggahi layanan ini. Dalam rangka akselerasi dan perluasan layanan tol laut, telah diusulkan Revisi Perpres 70/2017. “Draft revisi ini saat ini sedang dalam proses paraf ke Menko Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam draft revisi perpres ini selain berisi perluasan keterlibatan dan penugasan K/L juga pelaksanaan sinergi-kolaborasi dalam melaksanakan program tol laut.

Pelaksanaan sinergi-kolaborasi yang terus difasilitasi Kemenko Marves menunjukkan hasil yang menggembirakan, diantaranya dukungan Kominfo dalam menyediakan layanan internet 4G di pelabuhan singgah tol laut dan kantor dinas perdagangan setempat. Ini dimaksudkan komunikasi antara *consignee* dan *shipper* dan kapal angkutnya terhubung secara efektif,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mengharapkan penyelenggaraan pelayanan publik tol laut perlu ditingkatkan dalam skema perencanaan logistik terintegrasi, *Hub-Spoke* dapat dihubungkan dengan

baik, terjadwal. Selain itu, bahan-bahan yang dapat diangkut layanan tol laut tidak terbatas seperti yang disebutkan dalam Permendag 53/2020 tetapi dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat NTT.

Dalam agenda tersebut pun diungkapkan, bahwa harapan umum yang disampaikan oleh masyarakat adalah, keberadaan tol laut dapat berperan besar dalam menurunkan biaya rantai pasok maupun rantai pasok dingin komoditas unggulan sehingga dapat ikut mengembangkan ekonomi daerah.

Melansir data Kementerian Perhubungan, hingga saat ini negara telah hadir dan sudah membangun lebih dari 50 pelabuhan, 293 unit kapal yang terdiri dari 116 unit kapal perintis, 14 unit kapal kontainer, 6 unit kapal ternak dan 18 unit kapal rede dengan 2 unit digunakan sebagai kapal rumah sakit yang telah dioperasikan dan 138 kapal pelayaran rakyat telah dihibahkan kepada pemerintah daerah.

# Pemerintah Dorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Kehutanan

**Majalah Marves** - Pembangunan *food estate* telah dimulai sejak bulan September 2020 lalu. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan tinjauan lapangan pada kawasan *food estate* Sumatera Utara pada 27 Oktober lalu. Menindak lanjuti tinjauan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan *food estate* di Sumatera Utara pada Jumat (04-12-2020) untuk memantau dan menentukan langkah kerja ke depan.

“Melalui rapat koordinasi ini akan dilakukan evaluasi apa yang sudah diselesaikan dan yang perlu segera didorong untuk dapat mencapai target di akhir tahun 2020,” diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti dalam arahannya. Kendala di lapangan yang diakibatkan oleh cuaca dan akses jalan menyebabkan pekerjaan pengolahan lahan dan penanaman tertunda 15 (lima belas) hari. Oleh karena itu, perencanaan yang matang di awal adalah kunci kesuksesan program *food estate*. Untuk mematangkan perencanaan program *food estate*, telah dibagikan peran dari lintas Kementerian dan Lembaga yang telah bertugas sejak awal, baik dari persiapan pelaksanaan hingga pendampingan.

Dari perencanaan serta kerja sama antar K/L hal yang telah dicapai pada pengembangan *food estate* sampai saat ini adalah telah dibuka lahan dan dilakukan penanaman komoditi kentang, bawang merah, dan bawang putih di lahan seluas 215 Ha oleh Kementan dan akan segera disiapkan untuk panen. Untuk mendukung keberhasilan penanaman *food estate*, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur irigasi untuk mengairi lahan seluas 215 Ha, dan akan segera diselesaikan untuk sisa lahan seluas 785 Ha pada tahun 2021. Selain infrastruktur irigasi, infrastruktur jalan juga telah menjadi perhatian Binamarga dan akan segera dibangun di akhir tahun.



Pembangunan *food estate* telah dimulai sejak bulan September 2020 lalu. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan tinjauan lapangan pada kawasan *food estate* Sumatera Utara pada 27 Oktober lalu.



Penataan bidang tanah juga menjadi fokus dari Kementerian ATR agar seluruh lahan sudah bersertifikat. Selain itu, penetapan kelembagaan petani juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan karena akan panen dalam waktu dekat. “*Food estate* kini telah masuk Proyek Strategis Nasional, sehingga kita perlu mendorong *food estate* Sumatera Utara untuk dapat menjadi bagian dari PSN ini agar mendapatkan *benefit* yang sesuai,” jelasnya.

Untuk mendorong pengembangan *food estate* di Sumatera Utara, segera akan dibangun TSTH yang akan dikembangkan oleh IT Del dan BPPT serta Kementerian / Lembaga lain yang terkait. Agar pembangunan TSTH ini sesuai, maka dilakukan rapat konsiyering pengembangan TSTH dan *food estate* pada Kamis (03-12-2020). TSTH yang nantinya akan dikembangkan di Pollung merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) bagian penelitian dan pengembangan. Saat ini, langkah yang harus diselesaikan adalah tata batas dari KHDTK, dimana tata batas ini akan ditetapkan sebagai areal kerja untuk TSTH.

“Rencana tata batas ini menjadi penting karena untuk penegakan hukum dan areal kerja, dimana kita akan paralel juga mengerjakan perencanaan dalam pembangunan TSTH. Lokasi TSTH di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan akan menjadi barometer hasil pertanian dan kehutanan,” dijelaskan oleh Rektor IT Del Profesor Togar M. Simatupang. TSTH ini akan menjadi pusat pembibitan herbal dan hortikultura, demplot untuk mencoba kualitas unggul dari hasil tanam, laboratorium, kebun koleksi herbal dataran tinggi dan dataran rendah, produk hasil tanam, serta penyediaan jasa bagi masyarakat.

Dalam membangun TSTH ini, BPPT menamakannya sebagai *Pollung Technopolitan*. Dimana kawasan TSTH akan menjadi sentra dari kegiatan iptek yang dapat mendorong gerakan masyarakat dalam mempercepat inovasi dan teknologi. “Untuk mendorong hal ini, kita perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait dan mekanisme kerjanya harus diatur secara baik sehingga pekerjaan jelas dan dapat segera diselesaikan,” disampaikan oleh Heri Apriyanto sebagai perwakilan dari Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT.

Antara *food estate* dan TSTH itu nantinya akan saling bergantung, dimana kedua kawasan akan saling mempengaruhi untuk industri. Oleh karena itu, dilaksanakan kunjungan lapangan ke dua kawasan tersebut pada Rabu (02-12-2020). Keberlanjutan program dari *food estate* ketika pemerintah tidak lagi memberikan bantuan kepada petani menjadi masukan penting yang diberikan dalam kunjungan

lapangan. Oleh karena itu, dapat diperhatikan lebih dalam komoditas apa yang diperlukan pasar sehingga petani dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Petani juga butuh difasilitasi dalam proses paska panen, utamanya mengantisipasi panen raya.

“Saya harap pembahasan *food estate* dan TSTH ini bukan hanya membawa manfaat untuk Sumatera Utara, tetapi untuk Indonesia juga, diharapkan kita bisa bekerja bersama dengan semangat yang positif ini dan semoga kita dapat memajukan Indonesia, sehingga potensi yang kita miliki dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tutup Deputi Nani Hendiarti.

### Mendorong Ekonomi Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan Sosial (PS) telah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 terkait Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, program perhutanan sosial ini juga bertujuan untuk meningkatkan tutupan lahan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Untuk dapat mempercepat strategi perkembangan Perhutanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergisitas dan Kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Program Perhutanan Sosial pada November lalu (26 & 27 - 11 - 2020).

“36.7% dari masyarakat di Indonesia berada di kawasan hutan. Dengan program Perhutanan Sosial (PS), kita dapat melakukan pemerataan ekonomi serta dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, berdasarkan Rapat Terbatas pada 3 November 2020 mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial ditekankan perlunya percepatan implementasi program Perhutanan Sosial. Berdasarkan arahan Bapak Menko Marves bahwa program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada pemberian akses kelola, namun juga peningkatan kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Hal ini karena baru sekitar 8% KUPS yang telah berkategori *gold* dan *platinum*, sehingga diperlukan penguatan program pendampingan dengan

para mitra strategis,” ungkap Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti.

Target Perhutanan Sosial di tahun 2024 adalah distribusi akses legal kawasan hutan sosial untuk dikelola pada masyarakat 12,7 juta Ha. Akses ini akan diberikan kepada 1.668.508 KK dengan jumlah 22.600 unit SK Perizinan dan akan didorong pembentukan KUPS sebanyak 45.200 unit. Maka dari itu diperlukan adanya percepatan dalam program Perhutanan Sosial yang akan dikerjakan bersama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait bersama dengan Pemerintah Daerah.

Pada Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto. “Program perhutanan sosial adalah program pemberian akses kelola kepada masyarakat melalui 5 skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat,” jelasnya. Sampai dengan 31 Oktober 2020, pemerintah telah memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat melalui program Perhutanan Sosial seluas 4,4 juta Ha dengan surat keputusan 6725 SK bagi kurang lebih 873.670 KK.

Hasil Ratas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, diusulkan di 8 (delapan) lokasi Perhutanan Sosial Percontohan oleh Menteri LHK. Lokasi Usulan Prioritasnya adalah KUPS Wono Lestari di Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. “Perhutanan Sosial punya manfaat dari berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, kemitraan industri, pariwisata dan energi di dalam satu kawasan. Kami di Lumajang sudah merintis terkait interkoneksi perhutanan sosial. Sehingga, terjadi pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat kawasan Wono Lestari,” disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

Sebelumnya, Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan ke KUPS Wono Elstari di Desa Burno, Kecamatan Senduro, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa lalu (17-11-2020). Kunjungan ini didasari surat Menteri LHK terkait usulan lokasi Perhutanan Sosial yang dapat menjadi percontohan (*role model*) bagi pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi arahan kepada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan untuk mempelajari beberapa usulan lokasi percontohan Perhutanan Sosial.

“Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi perhutanan sosial yang berada di Kabupaten Lumajang yang diproyeksikan sebagai percontohan dari KUPS yang selanjutnya diusulkan untuk dapat dikunjungi Bapak Presiden,” ungkap Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti. Di lokasi tersebut, Deputy Nani dan rombongan melakukan observasi dan diskusi dengan perwakilan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah aktif, seperti Ekowisata Siti Sundari, peternakan sapi perah, pengembangan biogas, hingga usaha kripik talas.

Sebagai informasi, terdapat delapan lokasi yang diusulkan oleh Kementerian LHK sebagai KUPS Percontohan. Selain KUPS Wono Lestari di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ada pula 2 daerah lainnya yang juga diusulkan oleh Menteri LHK, yaitu KUPS Bentang Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat dan KUPS Wanigiri di Provinsi Bali.

KUPS Wono Lestari di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengembangkan usaha di bidang *agroforestry*. Pendapatan yang berasal dari hasil panen Kayu Sengon, Pisang Kirana, Talas, dan Susu Sapi sebesar Rp. 3.717.678 perbulan untuk setiap kepala keluarga yang berada di KUPS tersebut. *Offtaker* (penjamin) pada KUPS ini antara lain Perum Perhutani, PT. Sewu Segar Primatama, PT. Maksindo Karya Anugerah, dan PT. Nestle Indonesia. Keberhasilan pengembangan KUPS sebagai implementasi Program Perhutanan Sosial pasca izinnya membuat lokasi ini dipilih sebagai KUPS percontohan bagi wilayah lainnya.

Pencapaian pada target Perhutanan Sosial merupakan pekerjaan bersama yang melibatkan peran multisektor, bukan hanya di bidang kehutanan, melainkan seluruh sektor yang terkait pada lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, usaha masyarakat, perdagangan, dan juga sektor lainnya. Pemetaan program bagi K/L dalam mendukung perhutanan sosial dibagi ke dalam pengembangan kapasitas atau kelembagaan, pengembangan usaha atau bisnis, penguatan kewirausahaan, dan dukungan dari pemerintah daerah.

“Setelah rapat koordinasi ini, akan dibentuk tim perumus untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi Perhutanan Sosial agar percepatan program ini dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu, seluruh K/L terkait harus saling berkoordinasi terkait program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk percepatan Perhutanan Sosial ini,” tutup Deputy Nani.



# Menangkap Momentum bagi Pariwisata Nasional di Masa Pandemi

Sektor pariwisata termasuk pada jajaran sektor yang paling terdampak. Dampak ini diderita oleh berbagai pemangku kepentingan pariwisata mulai dari pemerintah daerah, industri penerbangan, hotel dan restoran, pelaku UMKM. Pada level daerah, Kemenkeu mencatat hingga 31 Oktober 2020 ada penurunan PAD sebanyak 14,85%, dimana penurunan terbesar diderita daerah-daerah dengan kontribusi PAD terbesar dari sektor pariwisata.

**Majalah Marves** - Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama lebih dari sepuluh bulan sejak munculnya kasus pertama di awal bulan Maret 2020. Karakteristik virus Covid-19 yang mudah menular dan angka penyebaran Covid-19 yang terus meningkat dengan cepat menuntut pemerintah untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mencegah penularan dan menurunkan angka penyebaran dengan ketat. Tentunya, pemberlakuan setiap kebijakan yang berorientasi pada implementasi protokol kesehatan akan memberikan dampak pada aspek lainnya, terutama perekonomian. Selain faktor kebijakan, ketakutan dan kecemasan masyarakat serta penurunan daya beli juga turut menjadi faktor-faktor yang menghasilkan perlambatan roda perekonomian, yang dampaknya dirasakan oleh berbagai sektor.

Sektor pariwisata termasuk pada jajaran sektor yang paling terdampak. Dampak ini diderita oleh berbagai pemangku kepentingan pariwisata mulai dari pemerintah daerah, industri penerbangan, hotel dan restoran, pelaku UMKM. Pada level daerah, Kemenkeu mencatat hingga 31 Oktober 2020 ada penurunan PAD sebanyak 14,85%, dimana penurunan terbesar diderita daerah-daerah dengan kontribusi PAD terbesar dari sektor pariwisata. Data PHRI menunjukkan bahwa hingga akhir November, kerugian yang dialami industri pariwisata, hotel dan restoran dalam skala nasional mencapai US\$7,1 miliar atau Rp100 triliun. Kebergantungan sektor pariwisata pada arus wisatawan mancanegara dan paradigma yang berorientasi pada kuantitas atau jumlah wisatawan menjadi sebuah hambatan besar ketika kebijakan larangan kunjungan wisata mancanegara diberlakukan. Data dari BPS mencatat adanya penurunan jumlah turis asing sebanyak 70,57% pada September 2020.

Tekanan yang dialami sektor pariwisata menandakan dibutuhkannya langkah-langkah pemulihan yang efektif dan efisien. Berkaca pada bagaimana pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan pola perilaku dan melahirkan disrupsi dalam kehidupan keseharian masyarakat, pemerintah Indonesia memandang masa ini sebagai momentum bagi pariwisata Indonesia untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi agar sektor pariwisata dapat bangkit kembali. Dalam hal ini, pergeseran paradigma dari orientasi kuantitas (*quantity tourism*) menuju orientasi kualitas (*quality tourism*) menjadi sebuah langkah yang sesuai dengan situasi masa kini serta mampu memberikan efek pemulihan secara berkelanjutan.

Pariwisata berkualitas atau *quality tourism* merupakan model pariwisata yang telah dikembangkan dan disesuaikan sehingga mampu memberikan pengalaman

terbaik bagi calon wisatawan dengan tetap menjamin aspek CHSE (*cleanliness, health, safety and environment*). Kecemasan dan ketakutan masyarakat terhadap penularan virus Covid-19 menjadi salah satu faktor utama menurun drastisnya angka perjalanan wisata. Oleh karena itu, penerapan protokol CHSE dalam pariwisata menjadi sebuah elemen krusial yang akan mampu mengembalikan kepercayaan calon wisatawan. Sebagai model pariwisata yang berorientasi pada kualitas, pariwisata berkualitas memiliki tiga prinsip utama: perlindungan lingkungan keanekaragaman hayati laut dan darat, pengembangan masyarakat dengan menjaga dan menghormati budaya lokal yang dibangun di atas fondasi warisan dan tradisi, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pariwisata berkualitas juga spesifik menasar segmentasi wisatawan dengan daya beli tinggi, yang diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara signifikan.

Konsep pariwisata berkualitas akan mulai diimplementasikan pada kelima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang terdiri atas Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang sebagai *pilot projects*. Agar konsep ini dapat terlaksana secara optimal, diperlukan pengembangan dalam berbagai aspek pariwisata mulai dari aspek SDM, pelestarian budaya dan tradisi lokal, peningkatan produk ekspor ekonomi kreatif, serta kemudahan perizinan usaha bagi investor. Salah satu upaya dalam realisasi pariwisata berkualitas adalah dengan membuka peluang investasi melalui *Indonesia-China Tourism and Investment Forum for 5 Key Superpriority Tourism Destination* yang diselenggarakan Jumat (18/12) lalu di Kawasan Kaldera Danau Toba dan Parapat, Sumatera Utara.

Survey McKinsey and Company yang berjudul '*What Can Other Countries Learn from China's Travel Recovery Part*' mencatat persepsi akan keselamatan dalam perjalanan wisata domestik di RRT telah meningkat secara signifikan sejak bulan Mei 2020. Tingkat penerbangan domestik, perjalanan kereta dan tingkat hunian hotel di RRT meningkat sebanyak 90 persen pada akhir Agustus 2020. Keberhasilan RRT dalam memulihkan stabilitas sektor pariwisata seyogianya dapat menjadi sebuah acuan. Forum ini menjadi wadah bagi Indonesia untuk mempromosikan kekayaan dan keunikan kelima destinasi wisata. Selain itu, pembukaan peluang investasi akan mempercepat pembangunan pada kelima DPSP sesuai dengan asas pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dan dengan demikian turut mempercepat pemulihan sektor pariwisata Indonesia.



# Guna Memperbaiki Perekonomian Nasional, Pemerintah Upayakan Terjadinya Peningkatan Nilai Investasi di Indonesia

**Majalah Marves** - Pandemi COVID-19 telah menginfeksi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya merugikan dari aspek kesehatan, virus Corona ini juga telah melumpuhkan sektor perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, banyak sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19 di Indonesia, seperti sektor konstruksi, transportasi, maupun pariwisata. Ketidakpastian ekonomi global akibat COVID-19 telah berdampak langsung terhadap investasi di Indonesia, yang tercermin dari penurunan arus investasi pada beberapa sektor dan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (November, 2020) PDB Indonesia telah berkontraksi sebesar 3,49% secara *year-on-year* (yoy) pada Q3, sedangkan investasi mengalami kontraksi lebih dari 6% yoy.

Sebagaimana diketahui, investasi merupakan instrumen penting dalam memulihkan pertumbuhan PDB, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Selain pandemi, iklim investasi di Indonesia juga masih terhambat oleh isu perizinan, tenaga kerja, serta pembebasan lahan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya membuat strategi terobosan guna membenahi dan membangun perekonomian nasional, salah satunya melalui penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, yang akan difasilitasi melalui omnibus law yakni UU Cipta Kerja.

Saat ini, pemerintah tengah berfokus untuk mendorong implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya guna mempermudah arus investasi. Investasi akan didorong melalui fokus pada area prioritas, monitoring dan penyelesaian masalah antar Kementerian dan/atau Lembaga, serta dorongan untuk *sustainable investment* atau investasi berkelanjutan. Melalui UU Cipta Kerja, ditargetkan arus investasi berbasis ekspor

(*export-oriented investment*) yang masuk akan meningkat, baik dari PMA maupun PMDN, sehingga dapat mengontrol Defisit Neraca Transaksi Berjalan (CAD) dan membuka lapangan pekerjaan.

Dengan metode omnibus law, 77 Undang-Undang disederhanakan dalam satu UU Cipta Kerja yang terdiri dari 186 pasal dan 15 bab. Pada umumnya, UU Cipta Kerja disusun guna menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha serta menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan pekerja.

Permasalahan utama yang dialami oleh Indonesia terkait investasi adalah rumitnya birokrasi dan regulasi yang berlapis dan saling tumpang tindih untuk membuka usaha. Saat ini, Indonesia masih menempati peringkat ke-73 dari 190 negara dalam peringkat kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dirilis oleh *World Bank* (24-10-2020).

"Menurut kami sangat baik seandainya kita bisa mempercepat penyederhanaan-penyederhanaan aturan, peningkatan iklim berusaha selama periode ini. Sehingga ketika ekonomi sudah recovery, maka kita akan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Ini satu kunci. Terkait dengan omnibus law, yang paling menarik adalah UU menggunakan pendekatan risk analysis dalam berinvestasi, tinggal nanti kita melihat bagaimana melihat implementasi dari peraturan-peraturan di bawahnya, seperti PP, Perpres, atau di level peraturan menteri," pungkas Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto.

Pada UU Cipta Kerja, proses perizinan kegiatan berusaha diubah menjadi perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) menggunakan single portal (*online single submission/OSS*) yang akan terbagi menjadi risiko rendah, risiko menengah, serta risiko



tinggi. Kedepannya, akan diberikan stimulus fiskal seperti *tax holiday* dan *tax allowance* serta mendorong pengalihan sebagian besar wewenang perizinan dari K/L kepada BKPM. Melalui UU Cipta Kerja, legalitas usaha yang dulu sulit didapat sekarang akan dipermudah dan disederhanakan.

Selain memberikan kemudahan perizinan berusaha, UU Cipta Kerja juga dapat membantu pada UMKM untuk mengakses permodalan dan bermitra dengan perusahaan menengah dan besar. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto, menyatakan bahwa saat ini perlu dilakukan upaya untuk mendorong kemudahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Kedua faktor diatas diyakini akan mendorong dan meningkatkan volume investasi di dalam negeri yang akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Seto dalam Rapat Koordinasi terkait UU Cipta Kerja (04-11-2020).

Guna memaksimalkan implementasi UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat juga melakukan koordinasi dan menyelaraskan sinergi dengan Pemerintah Daerah. "Terkait dengan omnibus law, yang paling menarik adalah UU menggunakan pendekatan *risk analysis* dalam berinvestasi, tinggal nanti kita melihat bagaimana melihat implementasi dari peraturan-peraturan di bawahnya, seperti PP, Perpres, atau di level peraturan menteri," kata Deputi Seto.

"Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan dapat mempercepat arus investasi yang sifatnya padat karya. Melalui kemudahan perizinan dan revisi pada beberapa aturan dalam UU Ketenagakerjaan, maka akan semakin menarik investasi untuk hadir di Indonesia," ungkap Deputi Seto dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat pada hari Senin (23-11-2020).

Investasi khususnya padat karya akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Lapangan kerja yang semakin banyak akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mendorong daya beli (konsumsi) masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

# Indonesia Menjadi Kunci di UN *World Ocean Assessment* Putaran Ketiga

**Majalah Marves** - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau The United Nations (UN) tengah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah isu-isu penting di seluruh dunia saat ini. Gelaran UN *World Ocean Assessment* (WOA) salah satu wujudnya yang berusaha menggali sekaligus mengidentifikasi isu dari berbagai negara di dunia yang dipandang penting dibahas di level internasional atau kancah dunia.

WOA merupakan salah satu agenda atau kegiatan yang mengkaji isu laut secara global. Setiap negara yang ikut berpartisipasi pada ajang ini akan membawa atau mengusung isu-isu yang dianggap penting untuk dibicarakan secara mendalam berbasis data dan kajian yang telah dilakukan dan kemudian dibawa pada pertemuan-pertemuan WOA. WOA kini memasuki fase atau putaran ketiga yakni 2021-2025, setelah putaran pertama dan kedua berlangsung pada 2010-2015 dan 2016-2020.

Pada UN WOA putaran ketiga ini Indonesia diminta secara khusus oleh PBB untuk ikut dan berperan lebih besar pada tema-tema penting sesuai dengan posisi geografis Indonesia di wilayah tropis dan cincin api. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara besar serta menjadi negara kepulauan di wilayah tropis yang memiliki peran sangat besar di dunia, terutama di bidang kelautan dan kemaritiman. Keikutsertaan Indonesia dalam WOA putaran ketiga ini sangat fundamental, strategis dan sentral.

Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Sosio Antropologi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Marves Tukul Rameyo Adi menjelaskan bahwa perhelatan UN WOA sendiri salah satu tujuannya untuk menangkap isu-isu skala global untuk dibahas secara bersama-sama di bawah naungan PBB. Berkaca pada gelaran sebelumnya, isu yang berhasil dihimpun itu tidak banyak diperhatikan sebagai basis kebijakan dan aksi berbagai negara di dunia. Sehingga dimulai pada gelaran UN WOA kedua 2015-2020 diperluas untuk membentuk semacam grup pakar (*expert group*) dan kelompok pakar (*pool of expert*) kewilayahan atau regional agar sama-sama memperhatikan isu penting masing wilayah-wilayah.

"Sebagai contoh sekarang ini sudah ada grup pakar Afrika, *The Indian Ocean Rim Association* (IORA), Pasifik Barat, dan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara antara baik ke Pasifik Barat dan Samudera Hindia, Indonesia memerankan peran penting secara regional," kata SAM Rameyo di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (17-12-2020).

SAM Rameyo mengungkapkan ada beberapa isu kewilayahan yang belum tertangkap secara global dalam gelaran UN WOA baik di kawasan IORA, Pasifik, dan lainnya seperti isu kebencanaan laut tsunami. Secara khusus pada UN WOA ketiga ini Indonesia akan mengusung tiga isu utama yang

sebelumnya sudah diminta langsung dalam forum tersebut yang juga dianggap penting oleh Indonesia lewat Kemenko Marves.

Isu pertama itu ialah kebencanaan spesifik tentang tsunami. Tak dimungkiri Indonesia berada dalam *ring of fire* yang menjadi titik temu lempeng tektonik dan Indonesia juga memiliki banyak fenomena alam yang patut menjadi perhatian secara serius.

"Tidak hanya menghasilkan kekayaan sumberdaya alam, tapi juga rawan bencana seperti gempa dan tsunami. Indonesia pernah dihantam tsunami di Aceh, itu masih menjadi sesuatu yang diingat global. Isu ini perlu disampaikan kepada anak cucu supaya hati-hati dan suatu saat mungkin akan terulang walaupun tidak di Aceh lagi. Sehingga sebagai negara yang dulu merasakan langsung dan punya dampak luar biasa besar dari bencana itu Indonesia diminta untuk menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman terkait ini yaitu kebencanaan tsunami," ungkapnya. Isu kedua kata SAM Rameyo ialah tentang perikanan. Hingga kini Indonesia dipandang menjadi pemeranan utama dalam dunia perikanan di level internasional karena memiliki kekayaan laut atau bahari yang luar biasa kaya nan melimpah. Bukan hanya sekadar kaya sumber dayanya tapi Indonesia sesuatu hal yang tidak dimiliki negara lain sehingga secara tidak langsung menjadi keunggulan tersendiri dalam siklus perikanan dunia.

"Isu perikanan, Indonesia sebagai negara dengan 70 persen wilayahnya laut pasti punya pengalaman, kebijakan, pengetahuan, model, dan metoda untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Disitulah Indonesia kemudian diminta berkontribusi ke global, apalagi waktu itu kita sangat keras untuk memerangi *illegal fishing* atau *illegal, unreported and unregulated* (IUU) fishing," terang pria yang akrab disapa Ram ini.

Menyoal IUU fishing Indonesia menjadi pusat perhatian dunia internasional. Pasalnya, semasa Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti kala itu Indonesia dipandang sangat tegas tentang IUU *fishing* dan dinilai memberikan perhatian serius serta memiliki kebijakan kuat terhadap laut. Ketegasan itu menjadi salah satu indikator keberhasilan Indonesia untuk menuju poros maritim dunia seperti yang pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo di pertemuan forum internasional.

"Kita sebagai negara yang banyak menghasilkan hasil-hasil

laut, diminta mengangkat isu ini dan tidak banyak dilakukan oleh negara di belahan dunia lain. Isu ini menurut UN WOA sangat penting agar Indonesia berkontribusi terhadap bagaimana pengelolaan isu perikanan," sebutnya.

Selain kebencanaan dan perikanan, isu yang bakal dibawa sekaligus digaungkan Indonesia dalam UN WOA putaran ketiga berkaitan dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisi (*local wisdom and traditional knowledge*). Ihwal ini sangat kentara pada Indonesia yang dikenal dunia internasional sebagai negara yang memiliki banyak suku, etnik, dan budaya. Bahkan dunia internasional menyematkan julukan khas untuk Indonesia karena kekayaan itu, 'Indonesia Laboratorium Budaya dan Antropologi Dunia'. Inilah menjadi alasan Indonesia diminta harus terdepan menyampaikan isu ini di level dunia.

"Karena semua berkumpul di sini dan membentuk lebih dari 1.300-an etnik yang memiliki berbagai budaya dan pengetahuan. Itulah kenapa Indonesia harus terdepan dan makanya kita mengusung isu ini," jelas SAM Bidang Sosio Antropologi Kemenko Marves ini bersemangat.

Disamping mengusung isu-isu penting itu dan membahasnya dalam UN WOA, dilanjutkan SAM Rameyo, ujung dari gelaran internasional ini adalah dalam rangka mendorong program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di dunia. Intinya, tujuan mulia SDGs adalah tidak boleh ada yang tertinggal atau *no one left behind* semua harus maju dan sejahtera, karena itu modal dasar untuk meraih dan mewujudkan hal itu dengan tetap memperhatikan pengetahuan tradisi.

"Semua harus maju bareng, sejahtera bersama, senang bersama, bahagia bareng-bareng, dan enggak ada yang tertinggal. Bagaimana itu bisa diwujudkan untuk mengajak seluruh masyarakat maju dan sejahtera bersama kalau tidak punya pemahaman terhadap pengetahuan tradisi dan kearifan mereka? Kalau kita mau mengajak bareng-bareng, program besar itu harus dimulai yang sangat lokal. Jadi aksinya harus sangat sangat lokal, tidak cukup hanya bicara di tataran nasional saja, pasti ada yang terlupakan," imbuhnya.

"Syarat SDGs itu bisa dicapai salah satunya harus dimauli di level tapak atau paling kecil, artinya dimulai dengan pemahaman dulu," sambungnya.

Melihat besar peranan dan pentingnya isu pengetahuan

tradisi ini, UN WOA pun mendorong Indonesia agar menelaah tema ini dan mengangkatnya sehingga menjadi perhatian global secara kolektif. Dorongan kepada Indonesia ihwal ini bukan tanpa alasan sebut SAM Rameyo, pasalnya Indonesia punya modal besar untuk mengarusutamakan isu karena dilatari kekayaan suku, etnik, dan budaya. Ia bahkan menyebutkan tidak banyak negara-negara di dunia yang memiliki keragaman seperti yang dimiliki Indonesia.

"Tiongkok, yang selama ini menjadi salah satu rujukan dunia cuma punya 53 etnik, Indonesia lebih keren, dari barat ke timur-selatan ke utara itu macam-macam. Jadi situlah kemudian UN WOA melihat Indonesia sebagai *influencer*. Jadi jika Indonesia tidak bicara tiga aspek ini, regional dan global pun akan kehilangan perhatian. Tiga hal ini menurut WOA yang harus diperkuat Indonesia," beber SAM Rameyo.

Ihwal tiga isu yang dipilih dan diusung Indonesia dalam perhelatan UN WOA putaran ketiga ini juga bersinggung kuat dengan kondisi Indonesia yang kini tengah menyusun atau mengembangkan haluan pembangunan jangka panjang periode 2020-2045. SAM Rameyo menyebut bahwa tiga isu yang dikerjakan untuk keikutsertaan dalam UN WOA 2020-2025 juga bermanfaat untuk kepentingan nasional.

"Saat ini kebetulan kita juga sedang transisi, RPJP 2005-2024 akan berakhir segera, dan kita perlu menyusun RPJP lanjutan 2025-2045. Jadi, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Sekalian saja mumpung kita ingin mengembangkan haluan jangka panjang. *Assessment* ini juga bisa dipakai untuk pengembangan haluan jangka panjang, untuk menyusun itu kita butuh informasi, basis data, dan *baseline* berbasis pada kajian sehingga kita dorong tiga hal ini. Jadi tiga hal ini, Indonesia kunci, kunci untuk isu tsunami, perikanan, dan pengetahuan tradisi. Jadi kalau Indonesia tidak berkontribusi, maka hasil WOA akan pincang. Mudah-mudahan di nasional kita punya semangat yang sama," tandasnya.

#### Indonesia Siapkan Kelompok Pakar Nasional untuk UN WOA

Guna menyiapkan segala bahan, data, dan keperluan lainnya untuk gelaran UN WOA putaran ketiga itu, Indonesia melalui Kemenko Marves pun langsung bergerak cepat dengan berbagai kegiatan terpusat. Salah satunya dengan menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) terkait Penyusunan *National Programme of Work dan Resource Requirement* di Jakarta, Selasa (24-11-2020). Kegiatan dikomandoi langsung oleh Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Sosio Antropologi Kemenko Marves, Tukul Rameyo Adi.

SAM Rameyo menyampaikan bahwa diskusi kelompok terpumpun ini merupakan bagian dari persiapan Indonesia untuk menyiapkan *pool of expert* atau kelompok pakar nasional yang akan terlibat pada UN WOA putaran ketiga.

"WOA akan memasuki putaran ketiga, 2021-2025. Jadi setiap lima tahun dunia di bawah PBB menyelenggarakan pengkajian tentang kondisi laut secara global, tujuannya untuk mengetahui kondisi laut dan bagaimana laut ini bisa berkontribusi ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau SDGs," kata SAM Kemenko Marves Rameyo dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun saat itu. SAM Rameyo mengungkapkan Indonesia sebagai kepulauan tropis terbesar diharapkan banyak memberikan informasi dan pengetahuan tentang laut tropis. Sebab selama ini, pada gelaran WOA putaran pertama dan kedua negara-negara tropis termasuk Indonesia minim keikutsertaan dan lebih didominasi negara maju. Setidaknya ada tiga isu utama yang diharapkan dapat dibawa dan disampaikan Indonesia pada gelaran internasional tersebut, pertama tentang perikanan; kedua bencana-bencana laut; dan ketiga pengetahuan-pengetahuan tradisi atau kearifan lokal tentang pengelolaan laut.

"Itu banyak di kita, sehingga dengan tiga ini bisa memberikan pengetahuan ke dunia supaya laut berkontribusi ke pembangunan berkelanjutan," ungkap Rameyo. Dia menjelaskan Kemenko Marves didaulat untuk mengoordinasikan segala persiapan Indonesia untuk menghadapi WOA putaran ketiga ini dan harus menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Adapun itu ialah susunan *pool of expert* Indonesia berisi para peneliti laut yang kemudian dituangkan dalam sebuah SK dan menyiapkan dokumen program kerja. Sebab jika dua hal itu tidak disiapkan, Indonesia akan sulit memberikan kajian kelautan di gelaran WOA putaran ketiga nanti.

"Ini banyak bahan dari Konsorsium Riset Samudera (KRS), ada dari tujuan dari pembangunan berkelanjutan, kita juga mengacu laporan hasil putaran sebelumnya, kita coba nanti membuat kerangka kerja terutama ruang lingkup yang dibagi menjadi beberapa isu penting nanti akan menjadi chapter-chapter di dalam laporan kajian," terangnya.

"Itu yang kita sebut dengan *programme of work*, Indonesia akan mengusulkan program kerjanya, mencakup tiga hal penting tadi. Setelah itu dapat, setiap isu, setiap chapter siapa ahli yang harus terlibat. Tadi kita sudah sepakati akan melibatkan pertama adalah yang ada di lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan kalau memang dibutuhkan juga yang ada di lembaga non pemerintah seperti NGO dan banyak lainnya," sambung SAM Rameyo.

Lebih lanjut SAM Kemenko Marves Rameyo menerangkan kerja tim kecil yang dibentuk dalam FGD ini akan menyampaikan hasil kajian kepada Deputi I atau Deputi

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves yang diharapkan akan membuat naskah SK untuk pool of expert dan program kerja yang telah dirancang. Selain itu, yang menjadi perhatian lain ialah diperlukan fasilitas dalam bentuk sebuah lembaga yang menjadi eksekutor program-program WOA yang telah disusun dan lembaga itu dipandang lebih cocok diemban Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Karena BMKG yang sudah pernah beberapa kali terlibat di WOA. Intinya kita adalah tim kecil mengidentifikasi dan menyiapkan tiga hal tadi dan disampaikan ke D1 yang kemudian dilegalkan, bisa Pak Deputi, Sesmenko atau Menko Marves supaya secara formal ditunjuk. Jadi kalau ada permintaan dari PBB/UN, kalau ada pertemuan-pertemuan atau diskusi jadi kita sudah ada orangnya," lanjut SAM Tukul Rameyo.

FGD ini sambungnya ialah pertemuan lanjutan yang selama ini telah digelar Deputi I Kemenko Marves dengan melibatkan sejumlah kementerian lembaga (K/L) terkait membahas persiapan Indonesia untuk WOA putaran ketiga tersebut. Kemenko Marves bersama K/L terkait rembuk dan membahas bagaimana posisi Indonesia yang kemudian menyiapkan segala bahan atau keperluan yang dibuthkan nantinya. "Sampai saya kemudian mengusulkan ada tim kecil bekerja menyiapkan bahan. Jadi intinya ini untuk menyiapkan bahan, data, informasi untuk mendukung SDGs di bidang kelautan dan kemaritiman," lanjut dia. Diungkapkan SAM Kemenko Marves Rameyo terdapat beberapa dampak sekaligus keuntungan bagi Indonesia jika berpartisipasi pada WOA putaran ketiga nanti, yaitu Indonesia akan menjadi tolok ukur atau *benchmark*, semakin dikenal, dan diperhitungkan dunia internasional dalam hal pengkajian laut. Artinya secara sederhana Indonesia memiliki keuntungan politik atau diplomasi.

"Kedua, dari sisi nasional sendiri kita juga sedang memasuki ujung Rencana Pembangunan Jangka Panjang, pembangunan 20 tahun yang berhenti sampai 2024. Periode 2025-2045 kita perlu menyusun haluan lagi untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun, ini butuh *baseline* juga, kita ingin sekalian saja bahwa selain untuk dunia juga untuk menyiapkan *baseline* atau pondasi untuk perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan yakni 2045, Indonesia emas. Disamping itu sebetulnya kegiatan-kegiatan ini juga bisa menjadi basis daripada pembangunan kelautan regional," ujarnya.

Menurut SAM Rameyo, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pengetahuan dan data, terutama kepulauan tropis sudah sepatutnya menjadi pemimpin dalam urusan laut di kancah internasional. Sehingga dengan keikutsertaan Indonesia pada UN WOA nanti dapat memberikan informasi serta data yang bisa membantu menentukan arah kebijakan pembangunan global terutama di sektor kelautan.

"Kalau kita enggak memberikan rekomendasi ke dunia boleh jadi arah pembangunan global atau rekomendasi UN nanti bisa salah, enggak komplit, banyak hal-hal yang enggak jelas, rahasia sebenarnya ada di kita. Itulah kenapa Indonesia sebagai negara

kepulauan terbesar sangat diharapkan berkontribusi bukan cuma kepentingan politik tapi secara keilmuan banyak informasi ada di kita," pungkasnya.

### **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Amanat Perpres Nomor 59**

Keberadaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs merupakan amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan. Hal itu seperti diungkapkan Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Marves Agung Kuswandono dalam sebuah acara di Bogor, Kamis (3-12-2020). Menurut Sesmenko Agung secara sederhana ada tiga hal yang patut dan perlu diperhatikan dalam SDGs ini pertama tentang *sustainability*, kedua pembangunan yang tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepala pemerintahan setiap lima tahun. "Ketiga, *goal* adalah capaian akhir yang harus kita capai dan *goal* tidak berhenti tiap lima tahunan atau akhir tahun. Harus kita capai betul-betul," kata Sesmenko Agung.

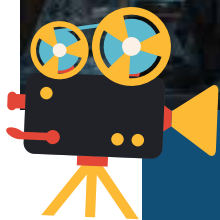
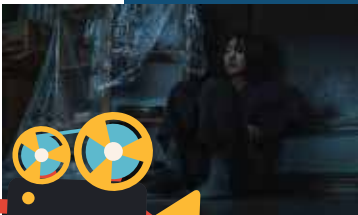
Sesmenko Agung menjelaskan bahwa modal untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia sudah dimiliki Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat serta terampil yang melimpah. Namun yang menjadi catatan ialah sisi manajemen atau tata kelola yang harus diperbaiki agar dapat memaksimalkan potensi.

"Kita masih masih terkotak-kotak dan masih belum terintegrasi hulu dengan hilir. Perlu kita pahami bahwa di hulu yang harusnya kita punya basis yang kuat untuk manajemen kita, saat ini baru kita mulai salah satunya adalah kebijakan satu data mestinya ini sudah puluhan tahun lalu kita siapkan," ujarnya. Sesmenko Marves menjelaskan dengan perangkat yang sudah ada ini, lalu Presiden menetapkan SDGs untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas kementerian atau lembaga lebih baik lagi mulai dari hulu, tengah, dan hilir sehingga semua terlibat. Ia memandang selama ini kementerian lembaga K/L cenderung bekerja sendiri-sendiri dan masih berdasarkan kepentingan pribadi fokus ke organisasi masing-masing sehingga capaian secara nasional tidak seperti yang diharapkan. "Jadi kesuksesan itu kesuksesan semu, jadi kita harus membuka diri, kita harus bekerja dengan pihak-pihak yang sebetulnya kita menjadi satu," ungkapnya.

Ia menambahkan yang menjadi topik utama dari SDGs atau TPB ini adalah menjadikan sebuah tujuan menjadi *goal* utama secara kolektif. Artinya melakukan perbaikan kesalahan secara bersama-sama, jangan saling menyalahkan, dan harus terlibat secara aktif untuk memperbaiki yang selama ini belum maksimal. Kemenko Marves kata dia, masuk dalam tim pokja di SDGs yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan untuk menetapkan matriks indikator pada masing-masing *goal*.



## Resensi Film: **The Call** “Masa Lalu untuk Masa Depan”



**Majalah Marves** - “Apa jadinya jika rumah yang baru saja kamu tempati tiba-tiba membawamu melintasi waktu bahkan mengubah nasibmu? Setidaknya itu lah yang dialami Seo Yeon (diperankan oleh Park Shin Hye) dalam film *The Call*. Seo Yeon mau tidak mau harus berhubungan dengan Young Sook (diperankan oleh Jeon Jong Seo), pemilik rumah di masa lalu tepatnya 20 tahun yang lalu atau tahun 1999.

Komunikasi di antara keduanya bermula saat Seo Yeon yang tanpa sengaja menemukan sebuah telepon tua di rumah tersebut, yang tak lama kemudian diikuti dengan panggilan telepon misterius dari seseorang yang bukan lain Young Sook. Meski awalnya Seo Yeon terkejut karena ternyata suara yang didengarnya berasal dari seorang di masa lalu dan sebaliknya, namun lambat laun keduanya memiliki hubungan pertemanan yang baik.

Saling bertukar cerita, Seo Yeon akhirnya menjelaskan bahwa pada tahun yang sama, ayahnya meninggal dunia karena kebakaran yang terjadi di rumahnya yang disinyalir kelalaian sang ibu saat memasak, setidaknya itu lah yang ia ketahui. Mendengar hal tersebut, Young Sook mengungkapkan akan mencegah kebakaran itu dan hasilnya sangat membuat Seo Yeon bahagia sekaligus kebingungan, Ayahnya kembali, sebab kebakaran tersebut tidak pernah terjadi. Lewat sebuah kejadian itu lah, Seo Yeon mengetahui dan yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh Young Sook di masa lalu akan mengubah kehidupan di masa depan.

Hidup bahagia dengan keluarga yang utuh, Seo Yeon terlalu sibuk untuk setidaknya mengangkat telepon dari Young Sook. Hal itu nyatanya membuat Young Sook marah, menuntut timbal balik, hingga membuka mata Seo Yeon bahwa ada yang aneh dengan teman masa lalu nya tersebut. Telepon dari Young Sook berubah menjadi suatu ancaman.

Satu persatu keanehan muncul, lantas membuat Seo Yeon mencari tahu lebih dalam siapa sosok Young Sook sebenarnya. Terkejut, karena nyatanya Young Sook merupakan seorang psikopat dan pelaku pembunuhan berantai. Sayangnya, hal tersebut baru Seo Yeon ketahui saat hidup dan mati dirinya bahkan keluarganya tengah di tangan Young Sook. Jika salah langkah, maka Seo Yeon yakin bahwa hidupnya bisa ‘lenyap seketika’ karena ulah Young Sook.

Secara keseluruhan, film bergenre *thriller* besutan sutradara Lee Choong-Hyun ini terbilang sangat menarik. Apalagi, sosok Young Sook yang seolah memiliki ‘kekuasaan’ untuk mengubah masa depan terbilang sangat kuat dan penuh misteri. Tak heran jika film dengan alur cerita yang sulit ditebak ini menjadi sangat menegangkan dan sangat mencekam hingga mampu membuat penontonnya merasakan sensasi teror yang ada pada adegan tertentu di filmnya.

Selain Park Shin Hye dan Jeon Jong Seo, film asal Korea ini juga dibintangi oleh beberapa nama populer dalam dunia akting yaitu, Kim Sung Ryung, Lee El, Park Ho San, Oh Jung Se, serta Lee Dong Hwi. *The Call* sendiri sudah bisa disaksikan di Netflix mulai 27 November 2020.

# COVID'S STARTER KIT







## Cerita Pendek

# Elegi Stasiun Tua

Karya Joko Rehutomo

Puing-puing terenggok menjejali pandangan sepasang mata kelabu. Dengan perut kosong, gontai aku melangkah mengitari selasar stasiun tua ini. Indra penciumanku yang tajam, kali ini tak menangkap sedikit pun aroma yang mampu menerbitkan air liur. Hanya bau pengap puing berdebu membuat tenggorokan kering. Potongan kayu lapuk dan asbes bertebaran di berbagai sudut.

Dalam hitungan hari semua telah berubah. Dulu tempat ini begitu ramai. Puluhan pedagang menggantungkan hidup pada deretan kios yang mereka sewa pada pengelola stasiun. Di salah satu kios itulah aku berjumpa dengannya. Seorang perempuan berkulit kuning, bermata sipit. Sehari-hari ia berjualan nasi uduk dan kue. Cik Mei Lan, para langganan memanggilnya. Umurnya sekitar empat puluh tahun dengan rambut lurus sebahu. Senyum semanis tebu senantiasa mekar, membuatnya selalu tampak lebih muda.

“Langseng, Langseng, di mana kamu?” suara lembut terngiang. Entah mengapa ia menyebutku dengan nama itu. Mungkin buluku yang hitam pekat menjadi acuan. Biasanya dengan manja aku mendekat, menggesekkan badan ke kaki jenjangnya yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Bibir merah alami merekah, menyodorkan piring seng berisi nasi dan ikan asin. Tentu saja aku girang bukan kepalang. Tanpa menunggu perintah kusantap sampai tandas.

Dengan fisik seperti itu tentu saja Cik Mei Lan menjadi bunga diantara para pedagang lain yang rata-rata berkulit sawo matang. Hanya dirinya warga keturunan yang berjualan di tempat ini. Para pembeli pun banyak yang mampir ke kiosnya, terutama mereka yang belum sempat sarapan karena terjajah waktu. Derit rem ular besi raksasa membuyarkan lamun. Penumpang berhamburan, tumpang-tindih antara yang turun dan naik, tiada yang mau mengalah. Matakau membola, berharap Cik Mei Lan terselip diantaranya. Sampai ular besi itu menutup perutnya kembali dan meliuk meneruskan perjalanan, sosok perempuan itu tak jua nampak.

“Langseng, Langseng...!” Cuping telinga berdiri, reflek kucari suara karib yang memanggil. Dari balik pagar besi terlihat bocah laki-laki membawa segepok koran. Ah, rupanya si Ucup. Selain Cik Mei Lan, ialah manusia kedua di stasiun ini yang akrab denganku. Biasanya selain ngider, ia menggelar korannya di depan kios Cik Mei Lan. Beringsut kuhampiri, wajah Ucup nampak cerah. Di telapak tangannya menggenggam remahan roti.

“Makanlah ini, kamu pasti lapar!” Lidahku terjulur menjilat, pangkalnya yang kasar membuat Ucup kegelian.

“Hei, bocah! Ngapain kamu di situ!” Hardikan keras membuat bulu-buluku meremang. Sesosok tubuh tegap berdiri pongah di hadapan kami. Remah-remah roti berceceran, roman Ucup pun pias.

“Oh, rupanya kamu! Ternyata masih bandel juga, ya!”

“Ti...tidak, Pak. Aku tidak lagi berjualan di sini, kok,”

“Lalu ngapain kalau nggak jualan?”

“Ngasih makan kucing. Kasihan, Pak,”

“Alasan saja kamu. Coba lihat remah-remah itu, bikin kotor saja!”

“Maaf, Pak,”

“Cepat pergi sana!” Satpam itu mengacungkan pentungan, nyali Ucup kian ciut. Tanpa menunggu hardikan berikutnya, bocah baik hati itu mengambil langkah seribu. Bersungut aku menyusul menyingkir. Andai satpam jumawa itu tidak bersepatu lars, pasti kakinya sudah berdarah, tergores kukuku yang tajam. Lain waktu aku harus memberinya pelajaran, agar ia sadar dan lebih bernurani. Kalau seperti ini tak ubahnya ia mirip bulldog, anjing penjaga yang selalu menggonggong bila rumah tuannya terusik.

\*\*\*

Tak usah dibayangkan betapa susahnyanya kini aku mencari makan. Tikus yang selama ini menjadi musuh bebuyutan, sekarang bukanlah mangsa yang menggairahkan. Badan mereka besar-besar dan

lorok, Rontok nyaliku untuk memburunya. Entah mengapa, kini bangsaku menjadi binatang pengecut. Nenek moyang bangsa kucing pasti akan prihatin, kami hanya bisa mengenang masa kejayaan.

Yang bisa kulakukan kini hanyalah mengorek sisa-sisa makanan dari tong sampah. Parahnya lagi, aku harus kembali bersaing dengan binatang pengerat dekil itu. Mereka memang serakah bukan kepalang. Dari tulang, sisa nasi sampai biji-bijian pun mereka santap. Terkadang bila terlambat, tinggal kudapatkan sisa. Dengan enteng mereka tinggalkan tong sampah yang berantakan. Dan akulah yang kena getahnya, jadi tertuduh. Dengan gemas pemilik warung akan mengomel, dan dapat dipastikan badanku akan kena tendang atau pukul. Dendamku meluap-luap. Tapi apa daya aku adalah kucing jantan yang hanya bisa mengeong dengan cakar tumpul yang tak pernah diasah.

Seperti malam ini, kulihat gerombolan tikus sedang berpesta-pora. Entah kapan mereka telah sampai di depan warung Padang ini. Seekor diantaranya berbadan sangat besar, seukuran anak kucing. Gigi tongosnya menyeringai, penuh ejekan. Bulunya begitu dekil. Pasti ia biasa berkeliaran di comberan. Aku mencoba mengusirnya dengan mengeong sekerasnya.

“Eh, jangan berisik!Ngeongmu tak lebih kencang dari cericit kami!” Matakku melotot, ia malah terkekeh. “Dengan melotot begitu, kamu nampak lebih tolo!”

Untuk kedua kalinya aku dibuat mati kutu. Selama ini mungkin salah bangsaku sendiri. Kebanyakan kami dimanja oleh manusia. Bahkan beberapa kerabat jauhku mendapat perhatian berlebih. Bulu lembut selalu wangi karena dirawat di salon khusus. Setiap bulan dokter hewan selalu memeriksa kesehatannya. Walaupun tidak seberuntung mereka, tapi selama ini aku selalu dimanja oleh Cik Mei Lan. Makanan selalu tersedia sehingga aku menjadi terlena. Hasilnya, kini aku hanya memendam kesal. Tak bisa berbuat lebih.

“Hoi...mengapa bengong begitu. Sini cepat, masih kami sisihkan sedikit tulang buatmu!” Brengsek, dunia memang sudah terbalik! Dianggap binatang apa aku ini. Tak sudi aku makan dari sisa binatang yang ditakdirkan jadi mangsaku itu.

Blarr...!Suara guntur memekak, diselingi kilat menyambar. Langit hitam pekat, sejenak akan menumpahkan kandungan air yang menggantung. Rinai pun perlahan menderas. Bergegas kulari menyelamatkan diri dari gempuran hujan. Aku dan seluruh bangsaku benci air. Biasanya kurapikan bulu dengan menjilat-jilatnya, dan itu sudah cukup.

Sambil menahan gigil, kurebahkan tubuh dekat loket karcis. Mata memberat, tapi hilir mudik penumpang membuatku selalu terjaga. Dunia manusia memang aneh, penuh dengan ketergesaan. Semuanya serba berebut, mulai membeli karcis sampai naik kereta. Bahkan tubuh mereka bergelantungan di atap, dengan suara berisik. Berteriak, seolah mereka makhluk paling gagah di bumi ini.

Ingatanku melayang pada sosok Cik Mei Lan. Bila hari hujan begini, aku pasti sudah meringkuk di depan kiosnya. Tanpa Cik Mei Lan mungkin aku tidak berumur panjang. Dulu ketika cemeng, indukku meninggalkan dalam onggokan kardus bekas di pembuangan sampah dekat stasiun. Buntutnya pun sampai kini aku tak pernah tahu. Mungkin ia telah kepincut dengan kucing garong idamannya.

\*\*\*

Di pagi buta, sepasang mataku yang belum sepenuhnya benderang, menangkap pemandangan tak biasa. Sekelompok lelaki berbadan tegap tengah berbaris rapi. Seorang yang mungkin komandannya sedang memberikan pengarahan. Samar kudengar, hari ini mereka harus waspada penuh terhadap kejadian yang akan terjadi.

Matahari baru setengah penggalah, ketika berbondong-bondong orang dengan semangat mendatangi stasiun. Wajah-wajah mereka tegang, meneriakkan tuntutan. Para satpam siaga, mengambil posisi pagar betis. Menjaga agar orang-orang yang tersaput emosi itu tidak merusak fasilitas umum.

“Perhatikan nasib kami!Kami sewa, tidak gratis!”

“Sewa kalian sudah habis. Kami hanya melaksanakan tugas!”

“Dimana nurani kalian?Kami mencari nafkah puluhan tahun disini!”

“Cepat bubar!Kalau tidak kami ambil jalan kekerasan!”  
“Bakar!Bakar!”

Suasana kian memanas, pengunjung rasa merangsek maju. Satpam dibantu polisi tak mau kalah. Pentungan karet mulai bicara, memukul membabi buta. Darahku mendadak tersirap, ketika seorang perempuan limbung terkena hantaman. Cik Mei Lan! Secepat kilat aku berlari, melesat menerobos keonaran yang tengah berkecamuk. Satu tujuan, menyelamatkan perempuan itu. Sosok mulia yang selama ini telah menopang jiwaku.

Tendangan telak mendarat, tubuhku terjepit, terinjak kaki-kaki manusia yang beringas. Aku mengeong selantangnya, kakiku menggapai, tapi sia-sia belaka. Nafas tersengal, pandangan mata mengabur. Hingga akhirnya menghilang sama sekali. Gelap! (\*)



Kementerian Koordinator  
Bidang Kematriman dan Investasi

# Selamat Hari Maritim Nasional 23 September 2020



[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)



Kemenko Bidang  
Kematriman dan Investasi RI



@kemenkomarves



@kemenkomarves



Kemenko Bidang  
Kematriman dan Investasi



# Selamat Hari Nusantara 13 Desember 2020

